BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruk, dan Variabel Penelitian

Penulis dalam Bab II menjelaskan mengenai konsep, konstruk dan variabel penelitian sebagai landasan teoritis yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun variabel yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai pemaham sistem informsasi, kredit, efektivitas dan pengendalian internal.

2.1.1 Sistem Informasi

Pengertian Sisem informasi Menurut menurut O'Brian yang telah dialibahasakan oleh Yakub (2012 : 16) sebagai berikut :

> "Sistem informasi (information system) merupakan kombinasi teratur dari orang-orang , perangkat keras (hardaware), perangkat lunak (software), jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Orang tergantung pada sistem informasi untuk berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan jenis alat fisik, perintah antara satu sama lain dengan menggunakan berbagai jenis alat fisik, perintah dan prosedur pemrosesan informasi, saluran telekomunikasi atau jaringan, dan data yang disimpan atau sumber daya data."

Sistem informasi juga merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan aliran informasi. Pada lingkungan berbasis komputer, sistem informasi menggunakan perangkat keras dan lunak komputer, jaringan telekomunikasi, manajemen basis data, dan berbagai bentuk teknologi informasi dengan tujuan untuk mengubah sumber data menjadi berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh pemakai.

Sedangkan menurut Tata Sutabri (2012 : 46) mendefinisikan pengertian sistem informasi yaitu :

> "Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan."

Suatu organisasi terdiri atas sejumlah unsur, orang yang mempunyai berbagai peran, kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan, tempat kerja, wewenang, serta hubungan komunikasi yang meningkat organisasi tersebut. Sistem informasi merupakan penerapan sistem di dalam organisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen. Telah diketahui bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Murdick & Ross yang dialihbahasakan oleh Al Hanif Fatta (2008 : 9) mengemukakan bahwa sistem informasi adalah sebagai berikut :

> "Sistem informasi adalah suatu alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi suatu perusahaan yang menyajikan sinergi organisasi pada proses."

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan kerangka kerja organisasi yang terdiri dari kombinasi informasi mencakup orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau sebuah perusahaan.

2.1.1.1 Komponen Sistem Informasi

Komponen sistem informasi terdiri dari beberapa bagian yang saling berintegrasi yang membentuk sebuah sistem. Menurut Azhar Susanto (2008: 207) komponen sistem informasi akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. "Perangkat Keras (*Hardware*)
2. Perangkat Lunak (*Software*)
3. Manusia (*Brainware*)
4. Prosedur (*Procedure*)
5. Basis data (*Database*)
6. Teknologi Jaringan komunikasi (*Communication Network Technology*)."

Penjelasan dari komponen-komponen sistem informasi akuntansi di atas adalah sebagai berikut:

1. *Hardware* (Perangkat Keras)

   Sumber daya *hardware* adalah semua peralatan yang digunakan dalam memproses informasi, misalnya komputer dan periferalnya, lembar kertas, *disk magnetic* atau optik dan *flash disk*.

   Hardware pada fungsinya terbagi atas komponen yang terdiri dari empat macam yaitu :

   1) Bagian Input (*Input Device*)

      Bagian Input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data kedalam komputer. Ada beberapa contoh peralatan yang dapat digunakan untuk memasukkan data, seperti untuk memasukkan data berbentuk teks (ASCII) atau berbentuk image (gambar), suara, video (gambar bergerak dan suara) dan penunjuk (pointer). Berikut merupakan alat yang dimaksud :

a. *Keyboard*, biasanya digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk teks (ASCI) ke komputer.

b. *Mouse*, merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pointer. *Mouse* digunakan untuk mempercepat perpindahan lokasi kursor dibandingkan bila menggunakan keyboard.

c. Scanner, merupakan alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk image (gambar).

d. Kamera digital (digital camera), merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyimpan data gambar.

e. Kamera video (video camera), merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan data gambar yang dapat bergerak juga bersuara.

f. Hardisk, merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data backup.

2) Bagian Pengolah Utama dan Memori

Bagian Pengolah Utama dan Memori merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memproses data – data. Berikut merupakan alat yang dimaksud :

a. Prosesor/CPU, merupakan jantungnya sistem komputer, tapi walaupun demikian prosesor ini tidak akan memberikan manfaat tanpa komponen pendukung lainnya. 3 komponen penting CPU adalah : Arithmetic and Logical Unit (ALU), Control Unit dan Register.

b. Memori (Memory), sebagai tempat penyimpanan, yang terdiri atas memori utama dan memori kedua atau tambahan.

c. Bus, merupakan kabel-kabel yang tersusun dengan rapih dan digunakan sebagai menghubungkan antara CPU dengan *primary storage*. Bus digunakan untuk mentrasnfer data atau informasi dari memory ke berbagai macam peralatan *input*, *output* atau jaringan.

d. *Cache Memory*, *Cahce* berfungsi sebagai bufer (media penyesuai) antara CPU yang berkecepatan tinggi dan *memory* yang memiliki kecepatan lebih rendah.

e. *Motherboard/Mainboard*, merupakan papan rangkaian tercetak yang berfungsi sebagai tempat penampungan komponen-komponen pendukung suatu sistem komputer.

f. *Driver card*, merupakan papan rangkaian tercetak yang berfungsi untuk memperluas kemampuan (ekspansion) suatu sistem komputer.

3) Bagian Output (*Output Device*)

Bagian Output merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk mengeluarkan segala bentuk informasi yang dapat dihasilkan dari pengolahan *data* serta komputer misalnya dalam bentuk suara, tayangan atau visual dan cetakan. Ada beberapa macam peralatan output yang biasa digunakan disini yaitu :

a. Printer, merupakan peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data ke kertas atau transparansi.

b. Layar Monitor, merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual.

c. *Head Mount Display* (HMD), merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual pada monitor yang ditempelkan di depan mata.

d. Liquid Cristal Display (LCD) Projector, merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dengan cara memancarkannya atau memproyeksikan ke dinding atau bidang lainnya yang vertikal.

e. Speaker, merupakan alat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pengolahan data atau informasi delam bentuk suara.

4) Bagian Komunikasi

Bagian Komunikasi merupakan alat-alat yang harus digunakan untuk mengkomunikasikan data dari satu lokasi ke lokasi. Ada beberapa macam peralatan komunikasi yang biasa digunakan disini yaitu :

a. *Network Card*,

b. HUB/*Switching*

c. Fiber Optik

d. Modem

2. *Software* (Perangkat Lunak)

Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada computer, sedangkan program

merupakan kumpulan dari perintah - perintah computer yang tersusun secara sistematis. *Software* terdiri dari dua macam yaitu :

1) *Operating System* (Sistem Operasi)

   Operating system (sistem operasi) berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer misalnya antara keyboard dengan CPU, dengan layar monitor dan lain-lain. Berikut merupakan jenis-jenis program dalam sistem operasi, yaitu :

   a. *Boostrap Loader*, untuk membaca bagian utama dari sistem operasi dari penyimpan kedua (*secondary memory*) atau tambahan ketika computer pertama kali dinyalakan.
   b. *Diagnostic Test*, untuk melakukan pengecekan terhadap jalannya komponen-komponen dari sistem komputer, seperti pengecekan RAM dan *Diskdrive*.
   c. Operating System Executive, untuk mengendalikan jalannya sistem computer, seperti menjalankan program dan mengirimkan perintah ke hardware (perangkat keras).
   d. *Basic Input/Output System* (BIOS), untuk mengendalikan peralatan input dan output.
   e. *Utility Program*, untuk memberikan kemudahan dalam memanfaatkan *disk*.

f. *File Maintenance*, untuk memberikan fasilitas kepada program yang dibuat oleh *user* (pemakai komputer) untuk membuat, membaca dan mengisi *file*.

2) Perangkat Lunak Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi merupakan *software* jadi yang siap digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu. *Software* aplikasi tidak diibuat memenuhi keinginan orang tertentu, *software* - *software* dibuat untuk kepentingan umum. Karena itu software aplikasi tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik orang-perorang. Berikut merupakan contoh *software* dalam perangkat lunak aplikasi, yaitu :

a. *Quicken*, merupakan salah satu *software* sistem informasi akuntansi.

b. *Word Processor*, merupakan *software* yang digunakan untuk mengolah kata.

c. *Spreadsheet*, merupakan *software* aplikasi yang digunakan untuk membuat table-tabel perhitungan angka.

d. *WorkGroup*, merupakan kumpulan software-software aplikasi yang digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti *Ms.Office*.

e. *Browser*, merupakan *software* yang digunakan untuk berhubungan dengan jaringan internet.

f. *Utility*, merupakan software-software yang bisa memberikan kemudahan bagi pengguna komputer dalam mengoperasikan

computer seperti memformat, menghapus, melihat direktori dan lain-lain.

3. *Brainware* (Sumber Daya Manusia)

Brainware (Sumber Daya Manusia) merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut.

Secara garis besar sumber daya manusia dalam sistem informasi ini dikelompokkan dalam dua bagian yaitu :

1) Pemilik Sistem Informasi

Pemilik sistem informasi merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Pemiliknya bisa satu orang atau lebih yang kesemuanya berasal dari manajemen organisasi itu sendiri.

2) Pemakai Sistem Informasi

Pemakai sistem informasi merupakan orang-orang yang hanya akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan seperti operator dan manajer (end user) yang berfikir secara general dan tidak detail.

4. Prosedur

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi sutau organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam

menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

Menurut Whitten yang telah dialihbahasakan oleh Azhar Susanto mengatakan aktivitas merupakan fungsi dari sistem informasi. Sedangkan Winograd dan Flores yang telah dialihbahasakan oleh Azhar Susanto menyatakan bahwa melakukan aktivitas pada dasarnya melakukan suatu kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi tersebut.

Sedangkan fungsi merupakan aktivitas yang mendukung operasi bisnis perusahaan. Fungsi sistem informasi mendukung fungsi bisnis yang sedang berjalan. Sebagai contoh mencakup pengolahan data, dukungan keputusan, dan otomatisasi perkantoran.

5. Database dan Sistem Manajemen Database

Database adalah suatu kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan penjelasan tentang data yang terhubung tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh organisasi.

Manajemen data merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi yang membantu perusahaan agar sumber daya informasi yang dimilikinya mencerminkan secara akurat sistem phisik yang diwakilinya.

6. Teknologi Jaringan Telekomunikasi

Telekomunikasi atau komunikasi data adalah penggunaan media elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau informasi dari satu lokasi ke satu atau beberapa lokasi lain yang berbeda.

Sehingga komponen sistem telekomunikasi menurut terdiri dari :

1) Kompuer (Host) untuk mengolah informasi.
2) Terminal yang memantau peralatan input/output untuk mengirim dan menerima data.
3) Saluran komunikasi (kabel, telepon, udara)
4) Pengolah komunikasi (*communication processor: Modem, Controller, Multiplexer,* dan *front end processor*) yang membantu mengirimkan dan menerima data.
5) Software komunikasi yang mengontrol aktivitas input, output dan mengelola fungsi lainnya dalam jaringan komunikasi.

Berdasarkan penjelasan komponen-komponen di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi begantung pada hardware, software, brainware, prosedur, database dan sistem manajemen database, serta teknologi jaringan komunikasi untuk melakukan input, proses, output, penyimpanan dan aktivitas pengendalian yang mengubah data menjadi informasi.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Informasi

Setiap perusahaan yang didirikan pasti mempunyai tujuan. Dalam mencapai tujuan tersebut tentu saja manajemen membutuhkan suatu alat guna

mencapai tujuan, dan salah satu alat guna tersebut adalah sistem informasi yang berguna memberikan informasi dan keputusan bagi pemakainya.

Sistem informasi harus dapat memberikan informasi yang akurat sebagai syarat pengendalian internal bagi perusahaan. Semakin baik sistem informasi maka semakin handal pula informasi yang didapat.

Menurut Wilkinson (2000 : 8) mengemukakan bahwa tujuan utama ditetapkannya sistem informasi dalam perusahaan dibagi menjadi tiga pokok yaitu sebagai berikut :

1. *"To Support the Day-to-Day Operations*
2. *To Support Decision Making by Internal Decision Makers*
3. *To Fulfill Obligations Relating to Stewardship."*

Dalam memberikan informasi yang mendukung kelancaran kegiatan operasional, diperlukan informasi tertentu yang mendukungnya antara lain informasi akuntansi maupun informasi nonakuntansi seperti informasi nasabah, informasi kredit dengan begitu informasi tersebut akan berguna bagi analis kredit dalam menentukan pemberian kredit.

Dalam memberikan informasi yang mendukung sebagai pengambilan keputusan terutama keputusan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi. Proses informasi perlu diperhatikan agar tidak terjadi risiko dalam menghasilkan sebuah keputusan yang dilakukan oleh para pembuat keputusan atau manajemen

Dalam memberikan informasi untuk memenuhi tujuan spesifik terakhir, yaitu untuk memenuhi kewajiban pada pihak luar atau nasabah berkaitan dengan

perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka diperlukan informasi yang berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban untuk kedua belah pihak.

Dengan memperhatikan tujuan-tujuan diatas, maka dapat membantu dalam perencanaan sistem informasi untuk menganalisa dan merancang sistem tersebut agar dapat membentuk efektif dan efesien. Tujuan-tujuan tersebut pada dasarnya merupakan proyeksi dari tujuan utama dan tujuan akhir sistem informasi yang cepat, efisien dan aman serta dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian.

2.1.2 Kredit

Pengertian kredit menurut UU No. 10 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 yaitu :

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Adapun menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 dalam Irham Fahmi (2014 : 3) mendefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Sedangkan menurut Iswi Hariyani (2010 : 10) menyatakan pengertian kredit, yaitu :

> "Kredit yang diberikan atas kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan."

Berdasarkan pengertian kredit tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya di ukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur, yang didasarkan oleh kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Kredit

Kategori kredit menyebabkan kredit itu memiliki beberapa posisinya masing-masing dengan kegunaan yang berbeda-beda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan public (masyarakat) bisa memutuskan mana kredit yang akan dipilihnya sesuai dengan yang diperlukan pada bentuk kebutuhan yang akan digunakannya. Berdasarkan Irham Fahmi (2014 : 8) dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kredit berdasarkan jenisnya :
    1. Kredit konsumtif (*consumptive credit*). Kredit ini adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Seperti untuk membeli sepada motor, mobil, rumah, perabotan rumah, untuk renovasi rumah dan lain-lainnya.
    2. Kredit produktif (*productive credit*). Kredit ini adalah umumnya di pakai atau diajukan oleh mereka bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya untuk berekspansi bisnis atau bertujuan untuk meningkatkan grafik hasil yang

telah diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi, seperti ingin menghasilkan produk baru/tambahan, ingin membuka kantor cabang baru (brand office) untuk bidang pemasaran. Umumnya kredit ini dibagi dua, yaitu :

1) Kredit investasi (*investment credit*) adalah kredit yang saat diajukan oleh seorang debitur ke kreditur dengan tujuan akan dipergunakan untuk membeli barang-barang modal (*capital goods*).
2) Kredit modal kerja (*working capital credit*) adalah kredit yang saat diajukan oleh debitur kepada kreditur dengan tujuan akan dipergunakan dananya khusus untuk membeli bahan baku (material) atau kebutuhan suku cadang (*spare part*).
3) Kredit perdagangan (*trade credit*). Kredit ini adalah umumnya dananya dipergunakan untuk keperluan perdagangan (trade). Kredit perdagangan diajukan dengan maksud untuk membuat agar barang yang telah diproduksi tersebut menjadi lebih berguna dan bisa dipakai oleh banyak orang bukan hanya pada mereka yang berada di satu area tapi diharapkan barang tersebut bisa dipakai oleh banyak orang dari tempat yang berbeda baik daerah, Negara, kawasan dan juga budaya, atau ini biasa disebut untuk membuat barang tersebut memiliki peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Umumnya kredit perdagangan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
   a) Kredit perdagangan dalam negeri, dan
   b) Kredit perdaganagn luar negeri atau ini biasa disebut dengan kredit ekspor dan impor (*export and import*).

b. Kredit berdasarkan jangka waktu :

1. Kredit jangka pendek (short term credit). Kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun atau maksimum 1 (satu) tahun. Penggunaan kredit, ini misalnya dipergunakan oleh mereka yang bercocok tanaman yang usia pertanamannya adalah dalam kururn waktu hanya satu tahun.
2. Kredit jangka menengah (*medium term loan*). Kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Debitur biasanya mempergunakan kredit ini untuk keperluan yang menyangkut *working capital* yaitu seperti membeli bahan baku (*material*), membayar upah buruh, membeli suku-cadang (*spare part*) dan lain-lainnya.
3. Kredit jangka panjang (long term loan). Kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 (tiga) tahun, adalah kredit yang berjangka waktu melebihi 3 tahun. Debitur biasanya mengajukan dan mempergunakan dana hasil dari kredit ini untuk keperluan investasi, penambahan produksi, atau juga karena produk bisnis yang ditekuninya sudah mulai memasuki pasar luar negeri (international trade). Seperti untuk memperluas usaha dengan membuka kantor cabang (brand office) dan kantor cabang pembantu (sub brand office) di beberapa daerah atau bahkan di luar negeri, sedang melakukan pengerjaan proyek baru, dan lain-lainnya.

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam memutuskan pemberian kredit atau melakukan pencairan dana melalui kredit maka ada beberapa hal yang harus dipikirkan baik oleh kreditur atau juga debitur secara umum dan itu sudah menjadi penilaian umum.

Menurut Irham Fahmi (2014 : 15) prinsip-prinsip pemberian kredit dikenal dengan lima C (5C) yaitu terdiri dari :

1. "*Character* (karakteristik)
2. *Capacity* (kemampuan)
3. *Capital* (modal)
4. *Collateral* (jaminan)
5. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)."

Berikut merupakan penjelasan dari prinsip 5C yaitu sebagai berikut :

1. *Character* (karakteristik)

   Ini menyangkut dengan sisi psikologis calon penerima kredit itu sendiri, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya, seperti latar belakang kelaurganya, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaanya. Tinjauan karakteristik ini bisa dilihat pada bagaimana ia melakukan keputusan selama ini dalam hal ketepatan waktu yang menyangkut dengan perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan selama ini.

2. *Capacity* (kemampuan)

   Capacity adalah menyangkut dengan "*business record*" atau kemampuan seorang pebisnis mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihat "*ability to pay*" atau kemampuan membayar. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang adalah berbeda-beda. Setiap orang memiliki bakatnya masing-masing atau keahliannya yang berbeda

dengan orang lain dan itu pada dasarnya telah menjadi keunggulannya yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Maka pada saat seseorang memutuskan untuk masuk ke dalam satu sektor bisnis dan memulai bisnis tersebut maka yang menjadi persoalannya apakah bisnis yang dijalaninya tersebut adalah bisnis yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya atau lebih pada sebuah keputusan yang sifatnya melihat pada sisi *trend* saja.

3. *Capital* (modal)

   Ini menyangkut dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia melaksanakannya bisnis tersebut. *Capital* ini secara umum dapat dilihat pada *balance sheet, income statement, capital structure, return on equity, return on investment*. Maka akan lebih baik jika ia melakukan peminjaman kepada pihak perbankan atau leasing maka angka pengajuan kreditnya tersebut adalah melebihi dari kepemilikan modal yang dimilikinya. Karena jika ia melakukan peminjaman dana adalah melebihi dari kepemilikan modal yang dipunyainya maka jelas ini akan menimbulkan resiko di kemudian hari (*future risk*) apa lagi jika terjadinya persoalan kemacetan dalam *cash flow* atau aliran kas yang dimilkinya.

4. *Collateral* (jaminan)

   Collateral atau yang biasa disebut dengan jaminan adalah barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan peminjaman dana dalam bentuk kredit ke sebuah perbankan atau *leasing*. Untuk jenis barang ini dapat berupa mulai dari *land* (tanah), *building* (bangunan), *automotive* (mobil, motor) atau juga pesawat, helikopter juga

bisa dijadikan jaminan, dan juga barang lainnya yang kira-kira dapat disetujui oleh pihak analis kredit.

5. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

   Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu Negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, *purchasing power parity* (daya beli), penerapan kebijakan moneter sekarang dan yang akan datang, dan iklim dunia usaha yaitu regulasi pemerintah, serta situasi ekonomi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan. Bagi analisis yunior bidang kredit atau bagi pihak yang akan memulai usaha serta juga bagi mereka yang tidak berlatarbelakang pendidikan ekonomi dan masih memiliki banyak kekurangan dalam memahami persoalan *condition of economy* pada suatu Negara maka ada baiknya untuk tahap ini adalah dengan mencari informasi terlebih dahulu dari mereka yang telah lama berkecimpung dalam masalah kredit, seperti seorang analis kredit dari sebuah perbankan, penulis buku masalah kredit atau setidaknya meminta pendapat para ahli ekonomi.

Menurut Kasmir (2010 : 91) disamping menggunakan prinsip 5C, penilaian kredit dapat juga dilakukan dengan menggunakan metode analisis 7P yang terdiri dari :

1. *"Personality* (Kepribadian)
2. *Party* (Golongan)
3. *Purpose* (Tujuan)
4. *Prospect* (Harapan masa depan)
5. *Payment* (Sumber pembayaran)
6. *Profitability* (Kemampuan memperoleh laba)

7. *Protection* (Perlindungan)."

Berikut merupakan penjelasan dari metode analisis 7P yaitu sebagai berikut :

1. *Personality* (Kepribadian)

   Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan character dari 5C.

2. *Party* (Golongan)

   Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Purpose* (Tujuan)

   Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4. *Prospect* (Harapan masa depan)

   Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Ha ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment* (Sumber pembayaran)

   Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sector lainnya.

6. *Profitability* (Kemampuan memperoleh laba)

   Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection* (Perlindungan)

   Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melebihi suatu perlindungan. Perlindingan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Sedangkan menurut Hasibuan (2008 : 108) ada satu asas lagi yang harus dianalisis sebelum memberikan kredit yaitu 3R yang terdiri dari :

1. "*Return* (Hasil yang dicapai)
2. *Repayment* (Pembayaran kembali)
3. *Risk bearing ability* (Kemampuan menanggung resiko)."

Berikut merupakan penjelasan dari metode analisis 3R yaitu sebagai berikut :

1. *Return* (Hasil yang dicapai)

   Returns adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.

2. *Repayment* (Pembayaran kembali)

   Repayment adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaanya tetap berjalan.

3. *Risk bearing ability* (Kemampuan menanggung resiko)

   Risk bearing ability adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah resikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi resiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika *risk bearing ability* perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila *risk bearing ability* perusahaan kecil maka kredit diberikan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa proses analis kredit harus diketahui pasti maksud kegunaan dari kredit, sehingga manfaat kredit tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Dan tujuan penggunaan dana ini harus dapat diprediksikan kemungkinan untuk masa yang akan datang apakah bermanfaat atau tidak, juga diprediksi secara pasti setiap kemungkinan resiko yang akan muncul.

2.1.2.3 Proses Pemberian Kredit

Proses pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Dalam pemberian kredit kepada nasabah, harus berdasarkan pada penilaian yang tepat dan pada waktu penyelesaian pengembalian kredit tidak tejadi hal-hal yang mendatangkan kerugian kepada pihak yang memberikan kredit. Yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan tidak terbayarnya kredit yang diberikan. Pemberian kredit mengandung suatu tingkat resiko tertentu, untuk menghindari resiko yang kemungkinan terjadi maka permohonan kredit harus dinilai sesuai dengan dasar prosedur dan persyaratan pemberian kredit. Pendekatan karakter merupakan pendekatan terpenting menilai kelayakan pengajuan calon nasabah. Apabila penialaian layak maka akan dilakukan pendekatan *saving power* untuk menentukan plafon yang diberikan.

Dalam menerapkan sistem-sistem yang menjadi keunggulan perlu adanya promosi sehingga dapat konsumen, ini dapat dilakukan sehingga nasabah menjadi tertarik. Dalam perkreditan perlu menerapkan strategi promosi yang dapat silakukan antara lain dengan prosedur dan persyratan yang fleksibel dehingga bisa bersaing. Orientasi pelayanan pada nasabah mencerminkan keunggulan bersaing, adanya pelayanan yang diberikan dengan baik memberikan kepercayaan dimana pelayanan tersebut mengutamakan kepentingan nasabah sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah.

Menurut (Kuncoro & Suhardjono, 2012 : 226) menjelaskan bahwa proses dalam pemberian kredit terdiri dari tiga tahap yaitu sebagai berikut :

1. “Tahap kegiatan prakarsa dan analisa permohonan kredit
2. Tahap pemberian rekomendasi kredit

3. Tahap pemberian putusan kredit."

Berikut merupakan penjelasan dari tiga tahap proses pemberian kredit yaitu sebagai berikut :

1. Tahap prakarsa dan analisa permohonan kredit

   Tahapan ini dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kredit, yang meliputi beberapa kegiatan berikut :

   a. Kegiatan prakarsa permohonan kredit

      Kegiatan pada tahap ini antara lain adalah penerimaan permohonan kredit dari nasabah atau memprakarsai permohonan kredit, baik untuk permohonan kredit baru, perpanjangan kredit, perubahan jumlah kredit, perubahan syarat kredit, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit. Permohonan kredit diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh bank yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi pemohon/calon nasabah termasuk riwayat kreditnya pada bank lain (kalau ada). Pejabat pemrakarsa kredit selanjutnya kemudian melakukan kegiatan pencarian informasi selengkap-lengkapnya dari berbagai sumber mengenai pemohon.

   b. Kegiatan analisa dan evaluasi kredit

      Dari data dan informasi yang diperoleh pejabat pemrakarsa melakukan analisis dan evaluasi tingkat resiko kredit. Analisa dan evaluasi kredit dituangkan dalam format yang telah ditetapkan oleh bank dan disesuaikan dengan jenis kreditnya. Dalam analisa tersebut sekurang-kurangnya mencakup informasi tentang identitas pemohon, tujuan permohonan

kredit, dan riwayat hubungan bisnis dengan bank. Analisis kredit yang dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kredit meliputi analisis 5 C yang terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif.

Analisa kualitatif dilakukan terhadap kualitas dan stabilitas usaha dengan mempertimbangkan posisi pasar dan persaingan, prospek usaha, karakter pemohon, latar belakang dan kualitas manajemennya. Analisa kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis kondisi keuangan pemohon untuk mengetahui usulan kredit yang dapat diterima atau ditolak,

c. Perhitungan kebutuhan kredit

Perhitungan kebutuhan kredit dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti kredit yang benar-benar dibutuhkan oleh pemohon, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kelebihan kredit yang penggunaannya diluar usaha atau terjadi kekurangan kredit sehingga usaha tidak berjalan. Apabila dipandang perlu untuk mengetahui kepastian kredit yang dibutuhkan pemohon, bank dapat meminta studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan atas beban biaya pemohon.

d. Negoisasi kredit

Setelah kegiatan-kegiatan diatas, langkah berikutnya adalah menguji kekuatan, kelemahan dan identifikasi resiko yang merupakan kesimpulan dari seluruh analisa kredit. Kesimpulan tersebut harus mencakup hal-hal sebagai berikut :pejabat administrasi kredit dapat menyimpulkan bahwa usaha debitur yang akan dibiayai mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, identifikasi resiko-resiko yang akan

mengancam kelangsungan usaha pemohon atau merupakan titik kritis dari usaha yang akan dibiayai, serta melakukan antisipasi terhadap resiko-resiko tersebut yang dituangkan dalam syarat dan ketentuan kredit. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan selanjutnya pejabat aministrasi kredit melakukan negoisasi dengan calon nasabah.

2. Tahap pemberian rekomendasi kredit

   Rekomendasi kredit dibuat oleh pejabat perekomendasi kredit berdasarkan analisa/evaluasi yang dibuat oleh pemrakarsa kredit. Dalam memberikan rekomendasi kredit, pejabat administrasi kredit dapat meminta kelengkapan data dan analisis lebih lanjut dari pejabat administrasi kredit. Disamping itu juga pejabat administrasi kredit dapat juga melakukan kunjungan ke lapangan untuk meyakinkan data/keterangan-keterangan yang telah disajikan akurat.

3. Tahap pemberian putusan kredit

   Pemberian putusan kredit hanya dapat dilakukan oleh komite kredit yang diberikan kewenangan memutus kredit dari direksi bank. Sebelum memberikan putusan kredit pejabat pemutus kredit harus memeriksa dan meneliti kelengkapan paket kredit.

2.1.2.4 Analisis Kelayakan Kredit

Pengertian Analisis Kredit menurut Ismail (2010 : 111) adalah suatu proses analisis kredit yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur.

Sedangkan menurut Iskandar Syamsu (2008 :120) **A**nalisis Kredit di artikan sebagaipenilaian terhadap nasabah dan usahanya untuk diperoleh alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pada saat suatu pengerjaan proyek/usaha akan dilaksanakan dan pihak manajer membutuhkan dana yang sifatnya ekstern maka pengajuan kepada pihak perbankan adalah salah satu alternatif pembiayaan yang ditempuh. Maka di sini akan menjadi bahan kajian serius oleh pihak perbankan khususnya bagian analisis kredit apakah projek/usaha yang dikerjakan tersebut dianggap *feasible or infeasible* (layak atau tidak layak) untuk direalisasikannya pinjaman yang ajukan.

2.1.3 Efektivitas

Dalam kondisi usaha yang sedemikian kompetitif dewasa ini, masalah efesiensi dan efektivitas menjadi hal yang penting. Untuk menghindarkan diri dari akibat-akibat yang membawa kepada kegagalan dalam pemberian, maka dalam aktivitasnya bagian kredit harus mengetahui secara rinci jenis kredit yang bagaimana yang diperlukan oleh nasabahnya, kemungkinan-kemungkinan penyelewengan baik oleh nasabah dalam hal ini menyelewengkan kredit yang diberikan, maupun oleh pihak intern koperasi itu sendiri. Hal ini perlu dilaksanakan untuk menghindari inefisiensi dan inefektivitas dalam pemberian kredit.

Menurut Miller dalam Tangkilisan (2007 : 138) *Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goal. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments.*

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009 : 59) pengertian efektivitas yaitu sebagai berikut :

> "Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efesiensi meningkat."

Dari definisi diatas dapat diartikan secara umum, efektivitas menyangkut derajat keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan pengertian efektivitas informasi yang dijelaskan oleh Mc Loed yang dialihbahasakan dalam Azhar Susanto (2007 : 41) mengatakan bahwa:

> "Efektivitas artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk di dalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan".

Dengan demikian efektivitas dapat dikaitkan dengan hubungan erat pencapaian suatu hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, efektivitas adalah hubungan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi.

2.1.3.1 Efektivitas Pemberian Kredit

Pelaksanaan suatu kegiatan baru dapat dikatakan efektif bila suatu organisasi atau unit organisasi telah dapat mencapai tujuan dan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Untuk itu bagian perkreditan perlu menetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk mencapai tujuan pemberian kredit.

Pemberian kredit menggunakan prinsip-prinsip yang dikenal dengan 5C, 7P dan 3R. Apabila prinsip tersebut telah terpenuhi, diharapkan tujuan pemberian kredit akan tercapai. Disamping itu perlu dilaksanakannya prosedur pemberian kredit yang sesuai dengan prosedur organisasi dan umumnya.

Efektivitas pemberian kredit untuk kredit pensiunan ini yaitu proses pemberian kredit dengan analisa permohonan kredit, pemberian rekomendasi kredit serta putusan kredit yang efesien, tepat waktu, akurat dan tidak beresiko sehingga dapat mencapai tujuan dari kredit pensiunan. Hal ini juga didasari oleh dasar-dasar penilaian kredit yang harus sesuai. Tujuan perkreditan pensiunan ini seperti pencapaian pencairan kredit, market kredit, jumlah nasabah, serta target risiko kredit yang kecil.

Menurut Hadiwijaya & Wirasasmita (2000 : 107), efektivitas pemberian kredit dapat dilihat dari :

1. "Pelaksanaan anggaran pemberian kredit
2. Pelaksanaan anggaran pengembalian kredit."

Berikut merupakan penjelasan mengenai pemberian kredit dikatakan efektif :

1. Pelaksanaan anggaran pemberian kredit. Pemberian kredit dinilai efektif apabila jumlah pemberian kredit sesuai atau melebihi anggaran pemberian kredit, dan sebaliknya pemberian kredit tidak efektif apabila realisasi jumlah pemberian kredit kurang dari anggaran pemberian kredit.
2. Pelaksanaan anggaran pengembalian kredit. Pengembalian kredit dikatakan membaik apabila posisi tahun berikutnya lebih baik dari tahun sebelumnya dan nilai pengembalian sesuai dengan rencana tagih.

Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Berikut merupakan formula untuk mengukur tingkat efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \text{ x } 100\%$$

Sumber : (Ihyaul Ulum 2009:32)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan kredit dapat tercapai selain terpenuhinya prinsip dan prosedur pemberian kredit juga tercapaianya anggaran pemberian kredit serta pelaksanaan prosedur pemberian kredit. Jika nasabah dipilih dengan sesuai sasaran, dipercaya dan tepat guna, maka efektivitas sistem pemberian kredit akan tercapai.

2.1.4 Pengendalian Internal

Dalam suatu lingkup perusahaan yang sedang berkembang manajemen perusahaan memerlukan suatu control yang berhubungan dengan efektifitas perusahaan. *Control* ini berguna untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terjadi, agar perusahaan tetap terjaga dari setiap kemungkinan baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu prosedur yang efektif bagi pimpinan perusahaan dalam menjalankan tugasnya, sehingga harta kekayaan perusahaan dapat terjaga dengan aman, data akuntansi dapat diandalkan, mendorong adanya efesiensi usaha, serta dapat terus mengawasi apakah kebijakan yang telah diagariskan benar-benar telah dijalankan, serta dapat menjamin kebenaran mengenai informasi yang diberikan oleh bawahannya, sehingga tuuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan telah yang direncanakan.

Pada edisi baru ini, COSO (2013 : 3) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut :

> *"Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, manage-ment, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting and compliance."*

Memperhatikan pengertian pengendalian internal menurut COSO tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh bagian manajemen hingga bagian dasar, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan.

Adapun pengendalian internal menurut Krismiaji (2010 : 218) dalam sistem informasi akuntansi yaitu :

> "Pengendalian Intern *(Internal Control)* rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efiseinsi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen."

Pengendalian intern adalah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : 1) Keandalan pelaporan keuangan, 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, 3) Efektifitas dan efesiensi operasi Mulyadi (2002 : 180)

Dengan demikian dapat diartikan bahwa konsep pengendalian internal sebagai berikut :

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan.
2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dari formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap pemegang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya.
3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian yang menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

2.1.4.1 Komponen Pengendalian Internal

Setiap perusahaan memiliki karakter-karakter khusus yang berbeda sehingga pengendalian internal yang baik pada sutau perusahaan belum tentu baik untuk perusahaan yang lainnya. Agar tujuan pengendalian internal seragam dan dapat tercapai maka perusahaan perlu memperhatikan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi tujuan secara keseluruhan.

Menurut COSO dan SAS No. 78 dalam buku Azhar Susanto (2008 : 96) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki lima komponen yaitu sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian *(Control Environment)*
2. Penilaian Resiko *(Risk Assessment)*
3. Aktivitas Pengendalian *(Control Activities)*
4. Informasi dan Komunikasi *(Information and Communication)*
5. Aktivitas Pemantauan *(Monitoring Activities).”*

Berikut merupakan penjelasan lima komponen pengendalian internal yaitu sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian *(Control Environment)*

   Lingkungan pengendalian adalah bentukan suasana organisasi serta member kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi sua organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi semua komponen pengendalian intern lain yang melahirkan hierarki dan membentuk struktur organisasi. Lingkungan pengendalian dipengaruhi oleh sejarah dan budaya organisasi yang mempengaruhi bagaimana organisasi mencapai tujuannya. Berikut ini merupakan beberpa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian:

   1) Integritas dan nilai etika. Tujuan organisasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai didasarkan kepada pilihan dan pertimbangan nilai. Saat dihubungkan dengan standar perilaku. Pilihan dan pertimbangan nilai tersebut dapat mencerminkan integritas dan komitmen manajemen terhadap nilai etika.

2) Komitmen terhadap kompetensi. Kompetensi berarti karyawan yang memiliki pengetahuan dan keahlian untuk melakukan tugasnya. Manajemen menentukan sebaik apa tugas tersebut harus dilaksanakan dan apakah kinerja yang diharapkan tesebut sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mempekerjakannya.
3) Partisipasi dewan direksi dan tim auditor. Tim auditor beranggotakan harus dapat melaksanakan perannya dengan baik dalam menilai kebijakan dan operasi perusahaan agar sistem pengendalian dapat secara efektif mencapai tujuannya.
4) Filosofi dan gaya manajemen. Merupakan pendekatan manajemen dalam menghadapi resiko bisnis, sikap dalam menghadapi akurasi data akuntansi, dan perhatiannya terhadap kesesuaian antara anggaran dan realisasi operasi.
5) Struktur organisasi. Merupakan kerangka menyuluruh untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen.
6) Pemberian wewenang dan tanggungjawab. Manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan aktivitas serta membuat laporan yang diperlukan berkaitan dengan aktivitas dan metode pemberian wewenang yang dilakukannya.
7) Kebijakan mengenai sumber daya manusia dan penerapannya. Member pesan kepada semua karyawan tentang apa yang diharapkan organisasi berkaitan dengan masalah integritas, etika dan kompetensi.

2. Penilaian Resiko *(Risk Assessment)*

Penilaian resiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Resiko dapat berupa pesaing, perubahan kondisi ekonomi, kemajuan teknologi dan peraturan pemerintah.

Resiko berasal dari dalam perusahaan berkaitan dengan aktivitas tertentu di dalam organisasi misalnya gangguan yang menimpa sistem informasi baik yang disebabkan oleh kesalahan karyawan yang tidak terlatih atau karyawan yang tidak memiliki motivasi atau juga karena perubahan dalam tanggung jawab manajemen sehingga tidak efektifnya dewan direksi dan tim audit.

3. Aktivitas Pengendalian *(Control Activities)*

Pengendalian aktivitas adalah kebijakan dan prosedur yang dimiliki manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah dijalankan sebagai mana seharusnya. Pengendalian aktivitas ini harus member jaminan bahwa aktifitas yang dilakukan saat ini adalah untuk menghindari resiko yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pengendalian aktivitas meliputi:

1) Prosedur otorisasi. Prosedur ini dibuat untuk memberikan otorisasi (kewenangan) kepada karyawan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam suatu transaksi.
2) Mengamankan *asset* dan catatannya. Pengendalian aktivitas dofokuskan kepada keamanan asset dan catatannya. Manajemen harus menerapkan

perlindungan yang baik untuk melindungi asset dan catatannya. Perlindungan ini dapat berupa keamanan phisik dan kepastian tanggungjawabanya

3) Pemisahan fungsi. Pengendalian aktivitas menyoroti tentang pemisahan tanggung jawab. Manajemen dalam memberikan wewenang dan tanggungjawab kepada karyawan harus menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada orang lain.

4) Catatan dan dokumentasi yang memadai. Manajemen harus mengharuskan penggunaan dokumen dan catatan untuk menjamin setiap peristiwa atau transaksi telah tercatat dengan tepat.

4. Informasi dan Komunikasi *(Information and Communication)*

Informasi diperlukan oleh semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan, laporan keuangan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Informasi berkualitas (akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap) diidentifikasi, diambil/diterima, diproses dan dilaporkan oleh sistem informasi.

Komunikasi sudah tercakup dalam sistem informasi. Akan tetapi komunikasi lebih luas dari pengolahan data interal dan eksternal untuk menghasilkan laporan keuangan. Komunikasi terjadi pula dalam bentuk kebijakan penggunaan akuntansi manual atau berbasis komputer. Komunikasi dapat juga dilakukan dalam bentuk oral atau dalam bentuk tindakan manajemen. Komunikasi harus dapat menyampaikan pesan dengan jelas dari

top manajemen bahwa karyawan harus melakukan pengendalian intern yang serius. Setiap individu karyawan harus dapat memahami dengan jelas hubungan antara sistem pegendalian intern dengan peran yang harus dilakukannya.

5. Aktivitas Pemantauan *(Monitoring Activities)*

Pemantauan merupakan proses penilaian terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian intern. Perubahan organisasi dan cara bagaimana pengendalian intern diterapkan oleh perusahaan. Adanya pemantauan membantu manajemen dalam menentukan perbaikan sistem bagaimana yang diperlukan untuk menghadapi perubahan keadaan.

Pemantauan ini meliputi juga didalamnya penilaian terhadap rancangan dan penerapan pengendalian serta tindakan perbaikan. Pemantauan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu: melalui aktivitas yang sedang berjalan dan melalui penilaian yang dilakukan secara terpisah.

2.1.4.2 Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal dirancang dengan memperhatikan kepentingan manajemen perusahaan dalam menyelenggarakan operasi perusahaanya dan juga memperhatikan aspek-aspek yang dikeluarkan serta manfaat yang diharapkan.

COSO (2013 : 3) dalam framework terbarunya menyatakan mengenai tujuan-tujuan pengendalian internal sebagai berikut :

> *"The Framework provides for three categories of objectives, which allow organizations to focus on differing aspects of internal control :*
> 1. *Operations Objectives-these pertain to effectiveness and efficiency of the entity's operations, including operational and financial performance goals, and safeguarding assets against loss.*

2. *Reporting Objectives-These pertain to internal and external financial and non-financial reporting and may encompass reliability, timeliness, transparency, or other terms as set forth by regulators, recognized standard setters, or the entity's policies.*
3. *Compliance Objectives-These pertain to adherence to laws and regulations to which the entity is subject"*

Berdasarkan konsep COSO, bahwa pengendalian internal ditujukkan untuk tiga kategori yang memungkinkan organisasi untuk fokus pada aspek pengendalian internal yang berbeda yaitu berkaitan dengan tujuan-tujuan operasi, berkaitan dengan tujuan-tujuan pelaporan dan berkaitan dengan tujuan-tujuan ketaatan.

Sedangkan menurut Arens (2008 : 370), tiga tujuan utama sistem pengendalian internal juga mencakup sebagai berikut :

1. *"Reliability of financial reporting*
2. *Efficiency and effectiveness of operation*
3. *Compliance with applicable laws and regulation."*

Adapun penjelasan dari ketiga tujuan utama sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut :

1. *Realibility of financial reporting* (keandalan laporan keuangan)

   Manajemen memikul baik tanggungjawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggungjawab pelaporan keuangan tersebut.

2. *Efficiency and effectiveness of operation* (efesiensi dan efektivitas operasi)

   Tujuan yang penting dari tujuan ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan

3. *Compliance with applicable laws and regulation* (ketaatan pada hukum dan peraturan)

   Banyak hukum dan peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan dan mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Interpretasi dari tujuan pengendalian internal berdasarkan uraian di atas adalah bahwa pengendalian internal dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk menjaga kekayaan organisasi dari kecurangan dan penyelewengan;
2. Untuk memastikan bahwa penyajian pelaporan keuangan telah cukup andal dan dapat dipercaya;
3. Untuk memastikan bahwa efektivitas dan efesiensi dalam operasional telah tercapai; dan
4. Untuk memastikan bahwa organisasi telah patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Dari interpretasi diatas, pengendalian internal tersebut merupakan hasil dari suatu pengendalian internal yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal. Oleh karena itu, agar tujan pengendalian internal tercapai dengan baik, maka perusahaan harus mempertimbangkan unsur-unsur pengendalian internal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ninus Kurniadi (2014)	Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Pemberian Kredit Modal Kerja untuk Ekspor	Sistem Informasi Akuntansi, Modal Kerja	Sistem informasi akuntansi terhadap pemberian kredit modal kerja sudah efektif. Hal ini didukung oleh penerapan sistem pengendalian internal yang terdiri dari: 1) Lingkungan pengendalian, 2) Penaksiran resiko, 3) Aktivitas pengendalian dan komunikasi, 4) Informasi dan 5) Pemantauan.
2.	Lukman Nurhidayat (2012)	Peranan Sistem Pengolahan Data Elektronik dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Mikro	Sistem Pengolahan Data Elektronik, Efektivitas Pemberian Kredit Mikro	Sistem pengolahan data elektronik berpengaruh signifikan dalam menunjang efektivitas pemberian kredit. Hal ini termasuk dalam kategori efektif dan memadai, terlihat dari : 1) Sumber daya manusia, prosedur, alat pendukung seperti hardware dan software mendukung sistem pengolahan data

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				elektronik berjalan 2) Terpenuhinya indikator efektivitas pemberian kredit mikro sesuai dengan prosedur pemberian kredit yaitu menggunakan penilaian 5C.
3.	La Ane (2011)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dalam Menunjang Aktivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit	Sistem Informasi Akuntansi, Aktivitas Pengendaian Internal Pemberian Kredit	Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap aktivitas pengendalian internal pemberian kredit. Hal ini terlihat dari pertambahan satu satuan maka akan disesuaikan dengan pertambahan nilai pada sistem informasi akuntansi dan terdapat sisanya yang dijelaskan oleh variable lainnya
4.	Febrianty (2010)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Persetujuan Kredit	Sistem Informasi Akuntansi, Efektivitas Pengendalian Internal Persetujaun Kredit	Sistem informasi akuntansi dalam prosedur pengajuan dan pemberian persetujuan kredit telah memadai secara keseluruhan aktivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan telah dilaksanakan dengan baik dalam

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				mengurangi resiko kredit. Hal tersebut ditunjang dengan adanya karakteristik sistem informasi akuntansi dan unsur-unsur sistem informasi akuntansi.
5.	Maman Suherman, Chandra Christina (2008)	Peranan Sistem Informasi Kredit dalam Menunjang Pemberian Kredit Usaha	Sistem Informasi Kredit, Pemberian Kredit Usaha	Sistem informasi kredit berperan dalam menunjang pemberian kredit usaha, hal ini terlihat dari : 1) Dokumentasi mengenai kredit dilaksanakan dengan baik, tertib dan lengkap 2) Pemberian kredit sesuai dengan prosedur yang dimulai dari tahap pendaftaran sampai pencairan pencairan dana kredit, kemudian pengambilan keputusan, pengawasan dan pembinaan kredit 3) Kredit diberikan sesuai dengan realisasi anggaran dan mampu meminimalisir kerugian

2.3 Kerangka Pemikiran

Kebutuhan dalam kegiatan usaha di Indoensia tidak henti-hentinya berkembang sesuai dengan zaman. Kalangan kredit mulai bervariasi dengan menyuguhkan *variant* kredit akan tetapi tetap menjaga kestabilan kegiatan usaha. Koperasi sebagai salah satu penopang perkenomian rakyat ikut serta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan kredit. Salah satu kegiatan usaha yang dinilai minim atas resiko kredit yaitu kredit pensiun.

Pensiun merupakan jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Dengan begitu kredit pensiun pada intinya merupakan kredit yang sifatnya untuk konsumtif yang hanya diberikan kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pensiunan karyawan (PNS,BUMN/BUMD) yang didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak pemberi kredit dengan pengelola dana pensiun.

Tahun 2011 Bank Indonesia selaku bank central, melalui **SE No. Nomor 13/6/DPNP** (berlaku efektif per 1 Januari 2012), telah menetapkan bobot resiko untuk kategori kredit pensiun sebesar lima puluh persen (50%). Persentase ini berdampak pada pelaku kegiatan usaha termasuk koperasi yang tetap menjalankan asas kehati-hatian guna pemberian kredit yang berkualitas.

Untuk mengatasi masalah yang sering terjadi dalam perkreditan, penyimpangan utama yang harus diantisipasi dari langkah awal yaitu pemberian kredit, perusahaan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan pemberian kredit. Perusahaan seperti Koperasi juga harus harus bisa memperkecil resiko kredit dengan mempunyai pengendalian internal yang komperhensif dan jelas.

Dengan memperhitungkan berbagai macam faktor dan kriteria yang menentukan mutu pemberian kredit.

Pemberian kredit pensiun juga mengandung resiko, pihak Koperasi harus aktif dalam memilih nasabah. Cara dalam mempertimbangkan pemberian kredit yaitu dengan menganalisis terlebih dahulu kredit sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Analisis kredit merupakan suatu proses analisis kredit yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur.

Seperti yang dijelaskan, bahwa dalam mempertimbangkan suatu permohonan kredit, harus memiliki kerangka analisis yang baik dengan menggunakan penilaian prinsip-prinsip 5C, 7P dan 3R. Penilaian atas dasar prinsip-prinsip 5C, 7P dan 3R di atas, diperhatikan perusahaan agar pengendalian internal perusahaan tetap berjalan dengan efektif (Irham Fahmi 2014:15). Pengendalian internal dalam perusahaan dibutuhkan agar rencana organisasi tetap terjaga untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efiseinsi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Febriyanti, 2010).

Pengelolaan kredit dalam hal ini menekankan pada pengendalian internal yang diperlukan untuk menjamin aktivitas yang telah ditentukan. Ini merupakan cara agar resiko kredit dapat terhindar dan juga sebagai pedoman untuk sistem prosedur yang jelas. Adapun prosedur-prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit terdiri dari tiga tahap, yaitu 1)

Tahap Kegiatan Prakarsa dan Analisa Permohonan Kredit, 2) Tahap Pemberian Rekomendasi Kredit dan 3) Tahap Pemberian Putusan Kredit.

Dalam penerapan kebijakan pemberian kredit, perusahaan juga harus didukung oleh suatu alat yang berguna secara komputerisasi. Ini dimaksudkan guna mendukung hasil keputusan kredit dan juga mengantisipasi agar pemrosesan data dapat berjalan secara efesien dan efektif. Dengan Sistem Informasi Kredit Pensiun, maka pemrosesan kredit dapat dilakukan dengan efesien, tepat waktu, akurat dan tidak beresiko sehingga dapat mencapai tujuan dari kredit pensiunan yang baik (La Ane, 2011)

Sistem informasi diolah dari data yang dapat menghasilkan informasi guna pengambilan keputusan dalam pemberian kredit berdasarkan komponen-komponen yang saling terintergrasi. Jika hasil tersebut semakin mendekati sasaran atau tujuan maka semakin efektif pula pemberian kredit. Efektivitas pemberian kredit berarti menciptakan suatu sistem pemberian kredit yang sehat dan teratur serta pemberian kredit dapat dikatakan efektif jika proses dalam pemberian kredit dapat berjalan dengan efesien, cepat, tepat waktu, tidak beresiko sehingga 1) Pelaksanaan anggaran pemberian kredit, 2) Pelaksanaan anggaran pengembalian kredit.

Dari penjelasan diatas bahwa Sistem informasi ini juga didukung dengan pemanfaatan teknologi yang mempunyai kemampuan tinggi untuk mengolah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga berguna dalam pengambilan keputusan kredit. Tujuan dari Sistem Informasi Kredit khusunya pemberian kredit pensiunan untuk mengarahkan kegitaan pemberian kredit

pensiunan sehingga dapat mengurangi terjadinya kegagalan perkereditan karena waktu tunggu kredit dan untuk mengurangi resiko yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal pemberian kredit pensiunan. Efektivitas akan menunjukkan hubungan antara hasil yang dicapai dengan sasaran yang akan dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan sebuah skema kerangka pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran dari peneliti adalah sebagai berikut:

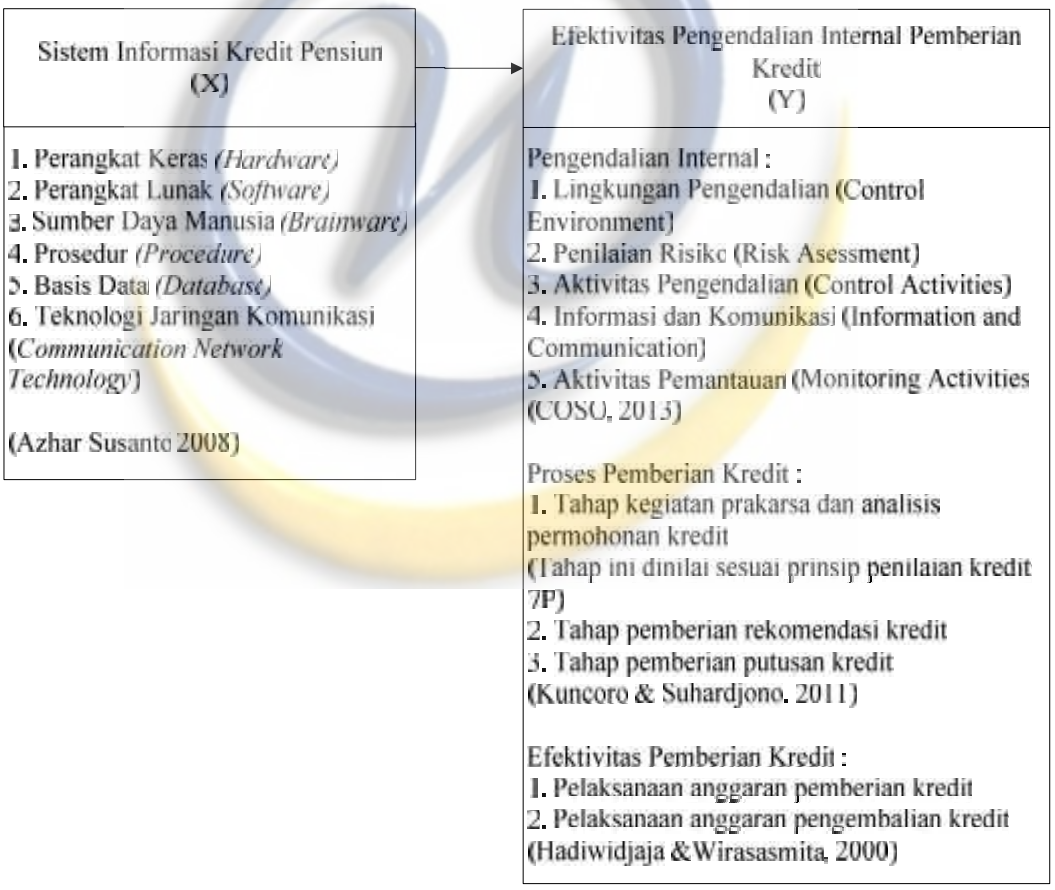

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014 : 64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_o : Sistem informasi kredit pensiun tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal pemberian kredit.

H_a : Sistem informasi kredit pensiun berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal pemberian kredit.